



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 16-32

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kebijakan Pendidikan Pasca Orde Baru

Husin<sup>1✉</sup>, Su'adi<sup>2</sup>, Minah Elwidah<sup>3</sup>, Sudur<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [husinjambi@uinjambi.ac.id](mailto:husinjambi@uinjambi.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstract

Islamic education in the post-New Order era has experienced developments both quantitatively and in terms of quality of implementation. The policies of the post-New Order era in Islamic education, for example: the government enforced Islamic religious education to be taught in elementary schools to higher education, madrasah and pesantren institutions began to be recognized, facilities were provided and so on. Government policies during the post-New Order era, although they provided a breath of fresh air for the development of Islamic education, stakeholders had to struggle and work hard to convince the government that the existence of Islamic education would continue to be recognized and have the same position as other education nationally.

*Keywords: Education Policy, Islamic Education, Post-New Order*

## Abstrak

Pendidikan Islam pada masa Pasca Orde Baru mengalami perkembangan baik secara kuantitatif maupun kualitas penyelenggaraan. Kebijakan masa Pasca Orde Baru dalam Pendidikan Islam tersebut, misalnya: pemerintah memberlakukan pendidikan agama Islam diajarkan pada sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, lembaga-lembaga madrasah dan pesantren mulai diakui keberadaannya, pemberian fasilitas dan lain-lain. Kebijakan pemerintah pada masa Pasca Orde Baru meskipun memberi angin segar bagi perkembangan pendidikan Islam, para *stakeholders* harus berjuang dan bekerja keras untuk menyakinkan pemerintah agar keberadaan pendidikan Islam tetap diakui dan memiliki posisi yang sama dengan pendidikan lain secara nasional.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Islam, Pasca Orde Baru*

## PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan identitas dan masa depan suatu bangsa. Sebagai sebuah negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama, Indonesia memandang pendidikan sebagai kunci utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan beradab. Dalam konteks sejarah modern Indonesia, periode pasca Orde Baru menjadi tonggak penting yang mencerminkan perubahan besar dalam kebijakan pendidikan. Era pasca Orde Baru, yang dimulai setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, membawa perubahan signifikan dalam paradigma, prioritas, dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Dengan mendalami perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi setelah Orde Baru, kita dapat memahami lebih baik bagaimana pendidikan Islam diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam di Indonesia. Analisis yang mendalam terhadap kebijakan pendidikan pasca Orde Baru akan memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif di masa yang akan datang.

Melalui tulisan ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak kebijakan pendidikan pasca Orde Baru terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, serta memberikan pandangan yang kritis dan konstruktif terhadap arah kebijakan pendidikan di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah *study literature* atau penelitian kepustakaan, yang mana akan mengkaji kembali temuan terdahulu berkaitan dengan analisis sistem akreditasi pendidikan Islam. Penyusunan artikel menggunakan data sekunder yang berasal dari temuan atau kajian terdahulu yang dikutip sesuai kaidah ilmiah. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis diskriptif kualitatif yang bertujuan menganalisis pokok permasalahan yang ada

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan publik. Konsep ini melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan, mengevaluasi efektivitasnya, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan (Riant, 2021).

Proses pembuatan kebijakan yang William N. Dunn, yakni lima tahapan dengan berbagai aspek yang mendukung masing-masing tahapan itu, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Di dalam penyusunan agenda kebijakan maka dirumuskan masalah; formulasi kebijakan dilakukan peramalan pendapat; adopsi kebijakan dilahirkan rekomendasi; implementasi kebijakan dilakukan pemantauan; dan di dalam penilaian kebijakan dilakukan proses penilaian/evaluasi kebijakan (William, 2003).

Langkah pertama dalam Analisis Kebijakan adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian kebijakan. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi yang ada, termasuk pemahaman atas faktor penyebab dan dampak masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan yang dapat menangani masalah tersebut. Proses ini memerlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, pakar, dan pemangku kepentingan terkait untuk menghasilkan solusi yang efektif dan memadai. Implementasi kebijakan merupakan tahap selanjutnya dalam proses Analisis Kebijakan. Ini melibatkan pengambilan keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, pembentukan struktur organisasi, dan pelaksanaan kebijakan secara konkret.

Evaluasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses Analisis Kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait dengan pelaksanaan kebijakan, serta penilaian terhadap sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi dapat diberikan untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang ada.

Pentingnya melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan Analisis Kebijakan tidak dapat diabaikan. Partisipasi mereka dapat memberikan wawasan yang berharga serta memperkuat dukungan terhadap kebijakan yang diambil. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Kebijakan, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih informan dan terarah, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang dilayani.

#### B. Evolusi Kebijakan Pendidikan di Indonesia pasca Orde Baru, terutama dalam konteks pendidikan Islam

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Evolusi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru mencerminkan dorongan besar untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitasnya secara merata di seluruh wilayah. Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum menjadi lebih menonjol, di mana pendidikan Islam tidak lagi dianggap sebagai entitas terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Evolusi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru di Indonesia telah melalui serangkaian perubahan yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, pemerintah Indonesia memulai era reformasi yang mengubah banyak aspek kehidupan bangsa, termasuk pendidikan. Salah satu langkah awal dalam evolusi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru adalah upaya untuk memperluas akses pendidikan, termasuk pendidikan Islam, ke seluruh lapisan masyarakat (Heny, 2023).

Pada awal tahun 2000-an, terjadi peningkatan jumlah sekolah agama Islam dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lebih berkualitas sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama masyarakat. Selain itu, pengembangan kurikulum yang mencakup nilai-nilai Islam juga menjadi fokus dalam menyelaraskan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional secara umum.

Upaya untuk memperluas akses pendidikan Islam tercermin dalam peningkatan jumlah sekolah agama Islam, pengembangan kurikulum yang mencakup nilai-nilai Islam, serta pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Program-program beasiswa dan bantuan pendidikan juga diselenggarakan khusus untuk memastikan bahwa siswa-siswa dari keluarga kurang mampu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan Islam yang berkualitas.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam pasca Orde Baru masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi, disparitas antara pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan, serta isu-isu terkait kualitas pengajaran dan kurikulum. Tantangan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa visi untuk pendidikan Islam yang inklusif dan berkualitas benar-benar terwujud di seluruh Indonesia.

Pemahaman yang mendalam tentang evolusi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru, terutama dalam konteks pendidikan Islam, menjadi penting dalam mengevaluasi progres pendidikan di Indonesia. Dengan pemahaman ini, kita dapat merumuskan strategi-strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam di masa yang akan datang, serta memastikan bahwa pendidikan Islam menjadi sarana pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Namun, kendati terjadi perbaikan dalam akses dan struktur pendidikan Islam, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi, terutama di daerah-daerah pedalaman, menjadi salah satu hambatan utama dalam memberikan pendidikan Islam yang berkualitas secara merata di seluruh Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Program beasiswa dan bantuan pendidikan khusus diperluas untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu juga dapat mengakses pendidikan Islam yang berkualitas. Selain itu, reformasi pendidikan yang terus-menerus dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kurikulum pendidikan Islam (Afiani, 2021).

Dengan pemahaman yang mendalam tentang evolusi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru, terutama dalam konteks pendidikan Islam, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan strategi-strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam di masa yang akan datang,

sehingga pendidikan Islam dapat berperan sebagai sarana pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

### C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kebijakan Pendidikan Pasca Orde Baru

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan pendidikan pasca Orde Baru sangatlah beragam dan kompleks, dan mereka telah membentuk perubahan yang signifikan dalam landasan pendidikan Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang memainkan peran penting dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan pasca Orde Baru:

- a) Dorongan Reformasi Politik. Runtuhnya rezim Orde Baru membawa gelombang reformasi politik yang meluas di Indonesia. Pemerintah yang baru memiliki kesempatan untuk merumuskan kembali kebijakan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.
- b) Tuntutan Globalisasi dan Kompetisi Global. Indonesia sebagai bagian dari dunia yang semakin terhubung secara global dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menghadapi persaingan global. Faktor-faktor seperti ekonomi global, teknologi informasi, dan mobilitas tenaga kerja internasional menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan pasca Orde Baru.
- c) Ketidakpuasan terhadap Sistem Pendidikan yang Ada. Selama rezim Orde Baru, banyak kritik terhadap sistem pendidikan yang dianggap terlalu sentralistik, otoriter, dan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Ketidakpuasan ini mendorong adanya permintaan untuk reformasi pendidikan yang lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada hasil.
- d) Dorongan untuk Meratakan Akses Pendidikan. Salah satu tujuan utama kebijakan pendidikan pasca Orde Baru adalah untuk memperluas akses pendidikan ke semua lapisan masyarakat, termasuk wilayah-wilayah terpencil dan masyarakat yang kurang mampu. Tekanan dari masyarakat dan kelompok-kelompok advokasi untuk meratakan kesempatan pendidikan memberikan dampak yang signifikan dalam pembentukan kebijakan pendidikan.
- e) Perkembangan Teknologi dan Informasi. Perkembangan teknologi dan informasi memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan pasca Orde Baru. Pemerintah harus mengakomodasi tantangan dan peluang yang dibawa oleh teknologi baru dalam mendesain kurikulum, menyediakan akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas pengajaran (Imam, 2022).

f) Pengaruh Kelompok-Kelompok Pemangku Kepentingan. Kelompok-kelompok pemangku kepentingan seperti guru, orang tua siswa, organisasi mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan pasca Orde Baru. Tekanan dan advokasi dari kelompok-kelompok ini dapat membentuk arah kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih responsif, inklusif, dan berkualitas untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan menghadapi tantangan global di masa depan.

#### D. Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Pasca Orde Baru

Integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional pasca Orde Baru mengacu pada upaya untuk menyatukan pendidikan agama Islam dengan sistem pendidikan nasional secara umum. Ini melibatkan penempatan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari kurikulum dan struktur pendidikan nasional, bukan sebagai entitas terpisah.

Salah satu bentuk integrasi adalah dengan menyertakan pendidikan Islam dalam kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah umum. Hal ini dapat berupa penyelarasan kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum nasional, sehingga siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Islam sekaligus mempelajari mata pelajaran lainnya.

Pendirian sekolah Islam dalam sistem pendidikan nasional mengacu pada proses di mana pemerintah memfasilitasi pendirian sekolah-sekolah Islam yang diakui dan diawasi oleh pemerintah dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Ini berarti bahwa sekolah-sekolah tersebut mematuhi regulasi dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kurikulum dan proses evaluasi, namun mereka juga mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pendidikannya (Shabr, 2012).

Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pendirian sekolah-sekolah Islam dengan memberikan izin operasional dan memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Sekolah-sekolah Islam ini juga wajib mengikuti kurikulum nasional yang telah ditetapkan, dengan penekanan pada pembelajaran umum yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan lain sebagainya, sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Namun demikian, sekolah-sekolah Islam ini juga menawarkan pendidikan agama Islam yang mendalam, sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal ini dapat tercermin

dalam penambahan mata pelajaran agama Islam dalam kurikulum, serta pengaturan lainnya yang memungkinkan siswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama Islam, adab, akhlak, serta nilai-nilai moral dan etika Islam.

Dengan demikian, pendirian sekolah Islam dalam sistem pendidikan nasional mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam yang berkualitas, sambil tetap memastikan bahwa standar pendidikan nasional dipertahankan dan nilai-nilai Islam terus diperkuat. Hal ini menjadi salah satu bentuk integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional yang inklusif dan beragam.

Integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional melibatkan beberapa aspek penting. Salah satunya adalah pelatihan guru-guru pendidikan Islam agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional. Guru-guru ini dilatih untuk mengajar mata pelajaran Islam dengan pendekatan yang modern dan efektif, sekaligus memahami prinsip-prinsip pendidikan umum. Dengan demikian, mereka dapat memberikan pembelajaran yang berkualitas dan relevan, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa.

Selain itu, integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan toleransi, kerukunan, dan kebhinekaan. Melalui pembelajaran tentang agama-agama lain dan dialog antaragama, siswa diberi pemahaman yang lebih mendalam tentang keanekaragaman agama dan budaya di Indonesia. Hal ini membantu membentuk sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antarindividu.

Integrasi pendidikan Islam juga tercermin dalam pengembangan materi pembelajaran yang terintegrasi antara mata pelajaran umum dan pendidikan Islam. Ini berarti mengembangkan bahan ajar yang tidak hanya mencakup aspek keilmuan dan keagamaan, tetapi juga memasukkan nilai-nilai moral dan etika Islam ke dalam mata pelajaran lain seperti bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan (Abdul, 2021). Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang holistik tentang Islam dan mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks integrasi, penting untuk mengakui kualifikasi dan sertifikasi guru-guru pendidikan Islam sehingga mereka dianggap setara dengan guru-guru pada mata pelajaran lain. Hal ini memastikan bahwa guru-guru pendidikan Islam memiliki kualifikasi yang sesuai dan diakui secara resmi dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian,

integrasi pendidikan Islam dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi pendidikan secara keseluruhan.

Integrasi juga mencakup penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Ini termasuk pembangunan gedung sekolah, pengadaan buku dan materi ajar, serta fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengajaran pendidikan Islam. Dengan mengadopsi berbagai bentuk integrasi ini, pendidikan Islam dapat menjadi bagian yang lebih terintegrasi dan seimbang dalam sistem pendidikan nasional, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada terciptanya generasi yang lebih berkualitas, berbudaya, dan beragam.

#### E. Tantangan Utama dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Pasca Orde Baru di Bidang Pendidikan Islam

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru di bidang pendidikan Islam meliputi:

- a) Kekurangan Sumber Daya Manusia Berkualifikasi. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan guru dan tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi yang memadai dalam bidang pendidikan Islam. Hal ini dapat menghambat penyediaan pendidikan Islam berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.
- b) Disparitas antara Pendidikan Islam di Perkotaan dan Pedesaan. Terdapat disparitas yang signifikan antara pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan. Sementara fasilitas dan sumber daya mungkin lebih terbatas di daerah pedesaan, akses terhadap pendidikan Islam yang berkualitas cenderung lebih mudah di perkotaan.
- c) Tantangan Kurikulum yang Relevan. Merancang kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memadukan antara nilai-nilai agama Islam dengan pembelajaran konten akademik lainnya merupakan tantangan tersendiri. Ini memerlukan pemikiran kreatif dan strategis untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berkualitas tetapi juga relevan dengan kebutuhan zaman.
- d) Pengelolaan Multikulturalisme dan Toleransi. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan Islam yang mampu mempromosikan multikulturalisme, toleransi, dan harmoni antaragama menjadi tantangan penting dalam implementasi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru (Ahmad. 2023).
- e) Kualitas Pengajaran dan Pendidikan Guru. Kualitas pengajaran dan pendidikan guru-guru pendidikan Islam juga menjadi faktor krusial. Diperlukan investasi yang cukup

dalam pelatihan guru dan pengembangan profesionalisme mereka untuk memastikan bahwa pengajaran dilakukan secara efektif dan bermutu.

- f) Penyediaan Fasilitas dan Sumber Daya. Terkait dengan kekurangan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai juga merupakan tantangan. Hal ini termasuk infrastruktur sekolah, buku-buku ajar, perangkat pembelajaran, dan akses ke teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan upaya bersama, diharapkan pendidikan Islam pasca Orde Baru dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan manusia dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

#### F. Dampak Kebijakan Pendidikan Pasca Orde Baru Terhadap Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Islam di Indonesia

Dalam konteks kebijakan pendidikan pasca Orde Baru di Indonesia, terdapat dampak negatif yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam. Pertama, terdapat kurangnya standar kualitas pendidikan yang jelas. Seiring dengan berbagai reformasi pendidikan yang dilakukan pasca Orde Baru, terkadang terjadi ketidakjelasan mengenai standar kualitas yang seharusnya diikuti oleh lembaga pendidikan, termasuk sekolah-sekolah Islam. Hal ini dapat mengakibatkan variasi yang signifikan dalam kualitas pendidikan yang ditawarkan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini berpotensi merugikan siswa-siswa di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap lembaga pendidikan berkualitas.

Selain itu, terdapat ketidaksetaraan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terdapat kesenjangan yang masih signifikan dalam hal aksesibilitas pendidikan Islam, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan pedalaman. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang kurang memadai, biaya pendidikan yang tinggi, dan kurangnya kesempatan pendidikan bagi perempuan, menjadi hambatan utama dalam mencapai akses pendidikan yang merata bagi semua individu di Indonesia, termasuk dalam pendidikan Islam.

Namun, di sisi lain, kebijakan pendidikan pasca Orde Baru juga membawa dampak positif dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam. Salah satu dampak positifnya adalah peningkatan aksesibilitas ke pendidikan Islam melalui pembangunan lebih banyak lembaga pendidikan Islam. Pemerintah telah mengambil

langkah-langkah untuk mendirikan lebih banyak sekolah-sekolah Islam di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan pedalaman, sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan Islam bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Selain itu, pemerintah juga memberikan program beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya untuk masyarakat kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pendidikan Islam yang berkualitas. Ini menjadi salah satu langkah yang penting dalam memastikan bahwa pendidikan Islam dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan pasca Orde Baru, terdapat langkah-langkah positif yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam di Indonesia. Dengan terus memperbaiki kelemahan yang ada dan memperkuat upaya-upaya yang positif, diharapkan pendidikan Islam di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

#### G. Upaya Meningkatkan Efektivitas dan Inklusivitas Kebijakan Pendidikan Pasca Orde Baru dalam Mendukung Pengembangan Pendidikan Islam

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan inklusivitas kebijakan pendidikan pasca Orde Baru dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam di Indonesia:

- 1) Reformasi Kurikulum. Salah satu upaya utama adalah reformasi kurikulum untuk memastikan bahwa pendidikan Islam terintegrasi dalam kurikulum nasional dengan memperhatikan nilai-nilai agama Islam sekaligus memenuhi standar pendidikan nasional. Kurikulum ini dirancang untuk mencakup pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, serta mendorong pembelajaran yang inklusif dan beragam.
- 2) Pengembangan Guru dan Tenaga Pendidik. Program pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru dan tenaga pendidik pendidikan Islam menjadi fokus utama. Melalui pelatihan ini, guru-guru pendidikan Islam diberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang efektif, menangani kebutuhan beragam siswa, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan inklusi dalam proses pembelajaran.
- 3) Peningkatan Aksesibilitas dan Kesenjangan. Upaya dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan Islam bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, dan anak-anak dengan

disabilitas. Program beasiswa, bantuan pendidikan, dan program khusus lainnya disediakan untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan Islam berkualitas.

- 4) Pengembangan Infrastruktur Pendidikan. Pemerintah juga berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan Islam, termasuk pembangunan gedung sekolah, pengadaan peralatan pembelajaran, dan peningkatan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan memadai untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas.
- 5) Promosi Toleransi dan Dialog Antaragama. Kebijakan pendidikan pasca Orde Baru juga mencakup promosi toleransi dan dialog antaragama dalam pendidikan Islam. Melalui program-program pendidikan, siswa didorong untuk memahami dan menghargai keberagaman agama dan budaya, serta membangun hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok agama di Indonesia.
- 6) Peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan menjadi aspek penting dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam pasca Orde Baru. Melalui program-program seperti beasiswa, bantuan pendidikan, dan program khusus lainnya, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan Islam berkualitas. Program-program ini diarahkan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, daerah terpencil, serta anak-anak dengan disabilitas agar mereka juga dapat menikmati manfaat dari pendidikan Islam yang berkualitas. Dengan meningkatnya aksesibilitas, diharapkan lebih banyak siswa dapat mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.
- 7) Pengembangan infrastruktur pendidikan juga menjadi prioritas dalam mendukung efektivitas kebijakan pendidikan pasca Orde Baru. Pembangunan gedung sekolah, pengadaan peralatan pembelajaran, dan peningkatan fasilitas pendukung lainnya dilakukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas. Dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efisien dan efektif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik.

Dengan melaksanakan upaya-upaya ini, diharapkan efektivitas dan inklusivitas kebijakan pendidikan pasca Orde Baru dapat ditingkatkan, sehingga pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan manusia dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

## H. Kebijakan Pendidikan pasca Orde Baru Telah Memenuhi Kebutuhan Dan Harapan Masyarakat Terkait Pendidikan Islam di Indonesia

Sejauh ini, kebijakan pendidikan pasca Orde Baru telah menghasilkan beberapa perubahan signifikan yang memenuhi sebagian besar kebutuhan dan harapan masyarakat terkait pendidikan Islam di Indonesia. Integrasi pendidikan Islam dalam kurikulum nasional, reformasi kurikulum, dan pengembangan guru merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Selain itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan Islam melalui program beasiswa, bantuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan telah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil, untuk mengakses pendidikan Islam berkualitas. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kekurangan sumber daya manusia berkualifikasi, disparitas antara pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan, serta perlunya peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum. Meskipun demikian, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia, dengan harapan bahwa masa depan akan membawa peningkatan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan Islam masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Pengintegrasian pendidikan Islam dalam kurikulum nasional dan reformasi kurikulum merupakan langkah penting dalam memperkuat pendidikan Islam di Indonesia. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai agama Islam dapat diajarkan secara holistik, sambil memastikan bahwa siswa juga memperoleh pengetahuan akademik yang komprehensif sesuai dengan standar nasional. Selain itu, pengembangan guru pendidikan Islam melalui program pelatihan dan pengembangan profesional membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yang merupakan faktor kunci dalam memberikan pendidikan Islam yang berkualitas (Ayu, 2020).

Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kekurangan sumber daya manusia yang berkualifikasi, terutama di daerah-daerah pedalaman, yang dapat mempengaruhi ketersediaan guru yang terlatih secara memadai. Disparitas antara pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan juga tetap menjadi isu, dengan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Islam yang masih belum merata di seluruh Indonesia. Selain itu, peningkatan kualitas pengajaran dan kurikulum tetap menjadi fokus utama dalam mengatasi tantangan ini, dengan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Meskipun demikian, langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan relevan dengan tuntutan global. Dengan terus memperhatikan masukan dari masyarakat dan memperbaiki kebijakan yang ada, diharapkan pendidikan Islam di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa dalam jangka panjang.

#### I. Prospek Kebijakan Pendidikan di Masa Depan, Terutama dalam Mendukung Pengembangan Pendidikan Islam di Tengah Dinamika Sosial dan Politik yang Terus Berubah di Indonesia

Di masa depan, prospek kebijakan pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks, terutama dalam konteks pendidikan Islam di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berubah. Salah satu prospek penting adalah lebih terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, di mana nilai-nilai agama Islam dipelajari sejalan dengan kurikulum nasional yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang Islam dan menjalankan ajaran agama dengan bijak, sambil tetap memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan modern (Takdir, 2019).

Selain itu, prospek kebijakan pendidikan juga mencakup peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Islam di seluruh negeri. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, melanjutkan pelatihan guru, dan menyediakan program bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu akan menjadi prioritas. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan Islam berkualitas, tanpa terkendala oleh faktor ekonomi atau geografis.

Namun, di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berubah, prospek kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan isu-isu kontroversial seperti pluralisme, intoleransi, dan radikalisme. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk mempromosikan dialog antaragama, toleransi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman budaya dan agama di Indonesia. Ini akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, harmonis, dan aman bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya mereka.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga dapat menjadi prospek yang penting dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam di masa

depan. Dengan memanfaatkan TIK, pendidikan Islam dapat diakses secara lebih luas dan efisien, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya. Ini akan membuka peluang baru untuk pembelajaran jarak jauh, pertukaran informasi, dan kolaborasi antarlembaga pendidikan Islam di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, prospek kebijakan pendidikan di masa depan harus berfokus pada menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan memperhatikan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berubah, diharapkan kebijakan pendidikan mampu menghadapi tantangan yang ada sambil memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pendidikan Islam dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis atas rumusan masalah yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa evolusi kebijakan pendidikan di Indonesia pasca Orde Baru, terutama dalam konteks pendidikan Islam, telah mengalami perkembangan signifikan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, sejalan dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, dalam proses pembentukan kebijakan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus diperhatikan.

Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan efektivitas dan inklusivitas kebijakan pendidikan pasca Orde Baru dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam, masih terdapat tantangan utama yang dihadapi. Tantangan tersebut meliputi kekurangan sumber daya manusia yang berkualifikasi, disparitas antara pendidikan Islam di perkotaan dan pedesaan, serta isu-isu kontroversial seperti pluralisme dan intoleransi.

Namun, dampak kebijakan pendidikan pasca Orde Baru telah terasa dalam peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam di Indonesia. Melalui program-program seperti reformasi kurikulum, pengembangan guru, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan, masyarakat Indonesia telah memperoleh manfaat yang signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam.

Namun, tantangan dan perubahan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang menimbulkan pertanyaan tentang prospek kebijakan pendidikan di masa depan, terutama dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan kebijakan pendidikan

yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pendidikan Islam dapat terus memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arofatul Zidah, Afiani, Krisna Ridha Pratama, dan Yohanes Purwanto. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9.1 (2021): 97-106.
- Asrulla, Asrulla, Risnita Risnita, M. Syahran Jailani, and Firdaus Jeka. "Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320-26332.
- Asrulla, Asrulla, Tuti Indriyani, and Firdaus Jeka. "TANTANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENDIDIKAN DI ERA SOCIETY 5.0." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 1 (2024): 161-178.
- Asrulla, Asrulla. "Pengaruh Pelatihan, Pengalaman Kerja, dan Reward terhadap Kinerja Tenaga Pendidik Pada Direktorat Pendidikan Nurul Islam Group Batam." *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 5, no. 1 (2022): 35-45.
- Basir, Abdul, Munzir Hitami, dan Abu Anwar. "Implementasi Integrasi Ilmu Pada Mata Pelajaran PAI di Sekolah Islam Nabila Kota Batam." *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 6.2 (2021): 95-108.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Alih Bahasa: Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Halim, Abdul. "Pluralisme dan Dialog Antar Agama." *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 14.1 (2015): 35-62.
- Jeka, Firdaus, Risnita Risnita, M. Syahran Jailani, and Asrulla Asrulla. "Kajian Literatur dalam Menyusun Referensi Kunci, State Of The Art, dan Keterbaruan Penelitian (Novelty)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26466-26474.
- Kurniady, Imam, dan Hasan Sazali. "Kajian Literasi Media Kiprah Pertelevisian Pasca Orde Baru dalam Perspektif Komunikasi Islam." *SAHAFA Journal of Islamic Communication* 5.1 (2022): 17-29.
- Kusmawati, Heny, et al. "Perkembangan Pendidikan Indonesia Setelah Tahun 1965 Sampai Runtuhnya Orde Baru." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2.9 (2023): 4054-4062.
- Misnatun. "Reformasi Pendidikan Islam di Indonesia Abad Ke-20 dan Abad Ke-21." *Ta'dib* 11.1 (2021): 63-69.

- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan*. Elex Media Komputindo, 2021.
- Pradika, Ayu Ratih Rizki. "Kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia." *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7.1 (2020): 8-17.
- Sohabudin, Ahmad, dan Wawan Darmawan. "Narasi alternatif dalam pembelajaran sejarah untuk pendidikan multikultural di Indonesia." *Indonesian Journal of History Education* 8.1 (2023): 61-78.
- Takdir. "Prospek Pendidikan Islam Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia", *El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1 (tahun 2019), 1-17.
- U., M. Shabir. "Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, *Lentera Pendidikan*, VOL. 16 No. 2 Desember 2013: 166-177.